

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik**

Oleh:

**TEGUH PRIANTORO
NIM. E1012181020**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Ilmu Administrasi**

Oleh:

**TEGUH PRIANTORO
E1012181020**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yudiris Pada:

TEGUH PRIANTORO
NIM. E1012181020

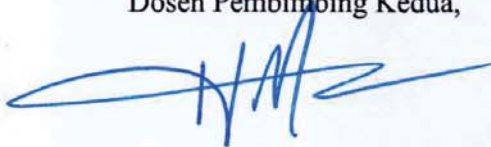
Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Pertama,



Dr. Azrita Mardhalena, M. Si
NIP. 196103031987102001

Dosen Pembimbing Kedua,



Dr. Arifin, M. AB
NIP. 197105021997021002

HALAMAN PENGESAHAN

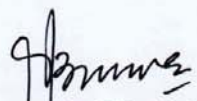
**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh:
TEGUH PRIANTORO
NIM. E1012181020

Dipertahankan di : Pontianak.
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Fisip Untan/Ruang Sidang 2.

Tim Penguji

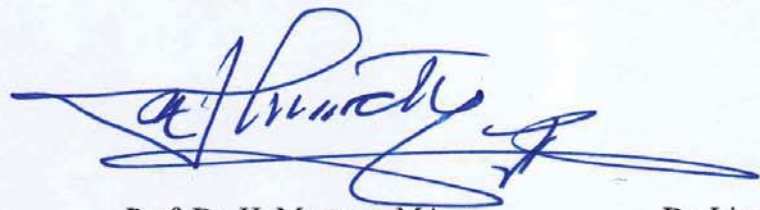
Ketua


Dr. Azrita Mardhalena, M. Si
NIP. 196103031987102001

Sekretaris


Dr. Arifin, M. AB
NIP. 197105021997021002

Penguji Utama


Prof. Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004

Penguji Pendamping


Dr. Lina Sunyata, M. Si
NIP. 196111111987032002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan



Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Teguh Priantoro (E1012181020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. **Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 2024.**

Implementasi bantuan PKH bagi anak sekolah di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan menyesuaikan terhadap regulasi yang telah diterapkan pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang ada di negara maju dan berkembang untuk dapat diselesaikan secara bersama dalam forum internasional sehingga ini menarik untuk diteliti. Penelitian berfokus pada PKH salah satu solusi dalam mengurangi kemiskinan dengan sasaran kebijakan untuk anak sekolah. Penelitian ini disusun secara kualitatif dengan penelitian deskriptif serta menggunakan data primer berupa wawancara, kemudian teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn, dapat ditinjau dari enam faktor seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan sikap para pelaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH dengan sasaran anak sekolah masih belum berjalan maksimal karena lemahnya pendampingan atau pengawasan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Selain itu lemahnya komunikasi antara Koordinator PKH dan pihak sekolah menyebabkan beberapa siswa atau siswi penerima bantuan PKH menganggap sepele kehadiran sehingga sikap ini jelas berpengaruh terhadap proses akademik yang sedang dijalani. Situasi seperti yang sudah dijelaskan harus segera diperbaiki sehingga keluarga penerima manfaat PKH dapat menjalankan kewajibannya sebaik mungkin sesuai dengan aturan dan tujuan dari PKH dapat tercapai. Sebagai saran, membangun kembali komunikasi dengan pihak sekolah terkait pengawasan terhadap siswa atau siswi penerima bantuan PKH.

Kata Kunci: PKH, Kemiskinan, Implementasi.

ABSTRACT

Teguh Priantoro (E1012181020). Implementation of the Family Hope Programme (PKH) in Poverty Reduction in Padang Tikar 1 Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. **Thesis. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University 2024.**

The implementation of PKH assistance for school children in Padang Tikar 1 Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province by adjusting to the regulations that have been implemented by the Indonesian government. This study aims to analyse the factors that influence the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in poverty reduction in Padang Tikar 1 Village, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. Poverty is one of the problems that exist in developed and developing countries to be resolved together in international forums so that this is interesting to research. The research focuses on PKH, one of the solutions in reducing poverty with policy targets for school children. This research is structured qualitatively with descriptive research and uses primary data in the form of interviews, then the theory used is the theory of Van Meter and Van Horn, which can be viewed from six factors such as policy standards and objectives, resources, inter-organisational communication and strengthening activities, characteristics of implementing agents, environment (economic, social, and political), and attitudes of implementers. The results of this study indicate that the implementation of the PKH policy targeting school children is still not running optimally due to weak assistance or supervision to PKH beneficiary families. In addition, the weak communication between the PKH Coordinator and the school causes some students or students receiving PKH assistance to take attendance lightly so that this attitude clearly affects the academic process being undertaken. Situations such as those described must be corrected immediately so that PKH beneficiary families can carry out their obligations as well as possible in accordance with the rules and the objectives of PKH can be achieved. As a suggestion, re-establish communication with the school regarding the supervision of students receiving PKH assistance.

Keyword : PKH, Poverty, Implementation



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”. Judul ini dipilih karena meninjau apakah PKH sudah di optimalkan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Tikar 1. Hasil peninjauan PKH untuk sasaran anak sekolah masih belum dijalankan secara optimal karena adanya beberapa kendala yang terjadi. Pendampingan atau pengawasan kepada keluarga penerima manfaat PKH belum maksimal lalu permasalahan komunikasi antara pihak Koordinator PKH dan Sekolah yang belum maksimal. Permasalahan ini dikhawatirkan dapat berpengaruh kepada keluarga penerima manfaat PKH dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam melihat proses implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel yang saling berkaitan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik), dan sikap para pelaksana. Menggunakan faktor-faktor tersebut maka penulis melakukan analisis terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar masih belum memaksimalkan komunikasi kepada pihak sekolah. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah selaku pihak yang berkaitan dengan PKH untuk anak sekolah. Keterangan yang didapatkan dari pihak sekolah mengindikasikan bahwa Koordinator PKH belum maksimal dalam mengawasi atau mendampingi keluarga penerima manfaat PKH untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pihak Koordinator juga tidak melanjutkan rekapan absen dari siswa atau siswi yang menerima bantuan PKH. Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan beberapa siswa atau siswi menganggap sepele kehadiran di sekolah, situasi ini tentunya dapat menghambat jalannya proses akademik sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban bagi penerima keluarga penerima manfaat PKH.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pihak Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar memperbaiki sistem pendampingan atau pengawasan kepada keluarga penerima manfaat PKH terutama yang mendapatkan bantuan bagi anak sekolah. Kemudian membangun kembali komunikasi dengan pihak sekolah terkait pengawasan terhadap siswa atau siswi penerima bantuan PKH. Saran yang diberikan ini dapat mempengaruhi keberlangsungan kebijakan PKH, karena bantuan kepada anak sekolah cukup panjang dan berhubungan dengan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Teguh Priantoro
Nomor Mahasiswa : E1012181020
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli dari saya sendiri dan bukan dibuat oleh orang lain serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi yang lain, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain atau instansi lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan saya sebutkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

Pontianak, 21 Januari 2025

Membuat Pernyataan



Teguh Priantoro
E1012181020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Disiplin adalah jembatan di antara tujuan dan prestasi, disiplin adalah perbedaan antara apa yang kamu inginkan sekarang dan yang paling kamu inginkan, disiplin yang kamu pelajari dan karakter yang kamu bangun dari menata dan meraih suatu tujuan dapat lebih bernilai dari pada pencapaian tujuan itu sendiri.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya yang telah membesarkan, menyayangi dan merawat saya serta selalu percaya dan mendukung saya dalam menggapai apa yang saya cita-citakan.
2. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah membantu dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atau rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul : **‘Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat’** ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, S. Sos, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Azrita Mardhalena, M. Si Selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Arifin, M. AB Selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian serta serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Martoyo, MA Selaku Penguji Pertama dan Dr. Lina Sunyata, M. Si Selaku Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
4. Dr. Lina Sunyata, M. Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
6. Kelurahan Desa Padang Tikar 1 beserta staf dan PKBM di Kelurahan Desa Padang Tikar 1 serta Tokoh Masyarakat di Kelurahan Desa Padang Tikar 1 yang menjadi informan pada penelitian ini yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa FISIP Untan angkatan 2018 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari ALLH SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, Januari 2025

Teguh Priantoro
E1012181020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	14
1.3 Fokus Penelitian	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
1.6.1 Manfaat Teoritis	15
1.6.2 Manfaat Praktis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Teori	16
2.1.1 Kebijakan Publik	16
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik	26
2.1.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik	33
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	46
2.3 Kerangka Pikir.....	48
2.4 Pertanyaan Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	52
3.4 Instrumen Penelitian	52
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	53
3.6 Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)	54
3.7 Teknik Analisa Data	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kubu Raya.....	56
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Batu Ampar.....	58
4.3 Gambaran Umum Desa Padang Tikar 1	60
BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PADANG TIKAR 1 KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	62
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian	62
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa	

Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	66
5.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan	66
5.2.2 Sumber Daya	72
5.2.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas	75
5.2.4 Karakteristik Agen Pelaksana.....	80
5.2.5 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	83
5.2.6 Sikap Para Pelaksana.....	87
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Simpulan.....	90
6.2 Saran.....	91
6.3 Keterbatasan Penelitian	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Grafik Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2022	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Desa Padang Tikar 1 Tahun 2024.....	8
Tabel 1.3.	Jumlah Masyarakat Miskin Desa Padang Tikar 1 Tahun 2024..	9
Tabel 1.4.	BPNT PKH Desa Padang Tikar 1 Tahun 2020 s/d 2024.....	10
Tabel 1.5.	Jumlah Bantuan Non PKH Desa Padang Tikar 1 Tahun 2024..	11
Tabel 2.1	Tabel Penelitian Yang Relevan	47
Tabel 3.1	Rencana jadwal pelaksanaan penelitian	51
Tabel 4.1	Riwayat Pendidikan PNS Kabupaten Kubu Raya	57
Tabel 4.2	Riwayat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Batu Ampar	59
Tabel 4.3	Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Tikar 1	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	49
------------	---------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Wawancara Kecamatan Batu Ampar.....	96
Lampiran 2.	Kantor Kecamatan Batu Ampar	100
Lampiran 3.	Wawancara Desa Padang Tikar 1	100
Lampiran 4.	Kantor Desa Padang Tikar 1.....	101
Lampiran 5.	Wawancara Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar	101
Lampiran 6.	Kantor Koordinator PKH Kecamatan Batu Ampar.....	101
Lampiran 7.	Wawancara Penerima Manfaat PKH.....	102
Lampiran 8.	Wawancara Sekolah MB. AL – IHSAN.....	102
Lampiran 9.	Sekolah MB. AL – IHSAN	102
Lampiran 10.	Surat Izin Penelitian Kantor Kecamatan Batu Ampar.....	103
Lampiran 11.	Surat Tugas Penelitian Kantor Kecamatan Batu Ampar	104
Lampiran 12.	Surat Izin Penelitian Kantor Desa Padang Tikar 1	105
Lampiran 13.	Surat Tugas Kantor Desa Padang Tikar 1	106
Lampiran 14.	Surat Persetujuan Melaksanakan Penelitian	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan rumit yang dialami hampir oleh setiap negara berkembang dan maju. Menurut Yacoub (2012: 1), menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan karena keterbatasan sumber daya. Selain kebutuhan pokok yang belum tercukupi, tempat tinggal dan pakaian yang tidak layak juga menjadi indikator tambahan masyarakat miskin. Beberapa faktor secara internal dan eksternal menjadi penyebab adanya kemiskinan. Faktor secara internal yang memengaruhi kemiskinan antara lain keterampilan diri serta pendidikan di bawah standar, kurang mampunya mengakses pekerjaan dan penyakit. Sedangkan faktor secara eksternal yang memengaruhi kemiskinan antara lain perang, korupsi dan bencana alam. Keterkaitan beberapa aspek dalam masalah kemiskinan menjadikan kemiskinan begitu rumit untuk diselesaikan serta memiliki dampak yang begitu luas di ekonomi, sosial maupun politik.

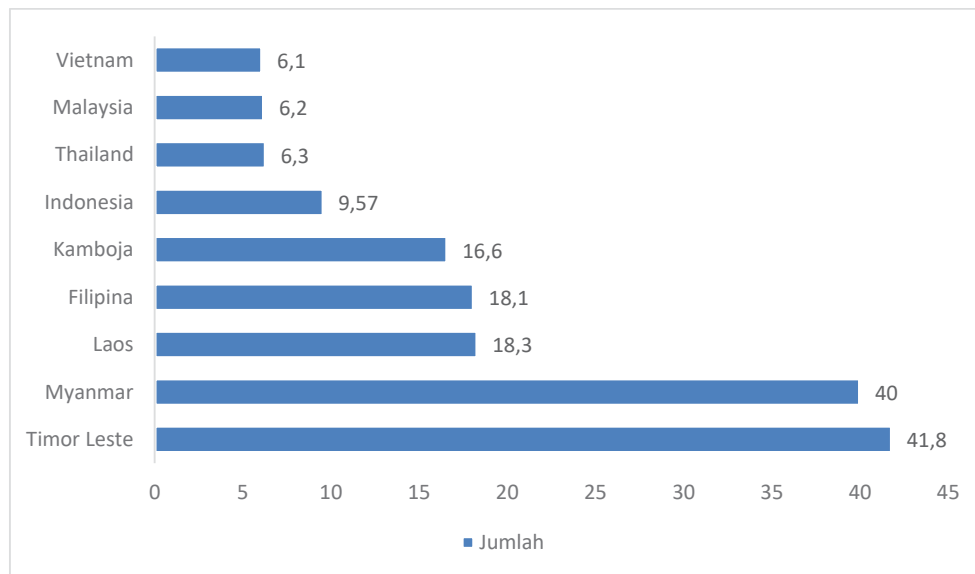
Dampak kemiskinan secara ekonomi dapat menyebabkan menurunnya produktivitas, pertumbuhan ekonomi lambat dan ketimpangan yang meningkat. Kemudian dampak kemiskinan secara sosial seperti diskriminasi, kekerasan dan

konflik. Dampak kemiskinan terakhir yang cukup penting serta dapat berpengaruh bagi stabilitas negara yaitu dampak kemiskinan secara politik seperti korupsi, oligarki dan tirani. Permasalahan rumit yang ditimbulkan oleh kemiskinan menjadikan kemiskinan sebagai program utama untuk diselesaikan di setiap negara. Hal terkait kemiskinan bahkan di bahas dalam forum international seperti *United Nations* atau yang lebih dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemiskinan didalam forum *United Nations* menjadi permasalahan pertama untuk diselesaikan, hal ini berdasarkan dokumen yang disajikan oleh *United Nations* (2023: 1) menyatakan bahwa: “*Eradicating extreme poverty for all people everywhere by 2030 is a pivotal goal of the 2030 Agenda for Sustainable Development*” (memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun pada tahun 2030 adalah tujuan penting Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030). Diskusi yang berkaitan dengan mencari solusi dari menghentikan kemiskinan melibatkan semua sektor untuk ikut berkontribusi. Pemerintah sebagai eksekutif sekaligus pemegang kekuasaan dalam mengelola negara dituntut untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah juga harus mampu untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam meningkatkan produktivitas sehingga perekonomian negara menjadi lebih baik. Sektor sains juga ikut berperan seperti memberikan akses air yang aman sehingga tidak adanya penyebaran penyakit melalui air merupakan salah satu contoh kontribusi dari bidang sains dalam mengurangi angka kemiskinan.

Isu kemiskinan bukan hanya menjadi fokus di forum global tetapi juga menjadi fokus di forum regional salah satunya adalah *The Association of Southeast*

Asian Nations (ASEAN). Program ASEAN sejalan dengan program *United Nations* untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Negara ASEAN didominasi oleh negara berkembang dengan tingkat kemiskinan diatas 5%. Berdasarkan data yang dirilis oleh DataIndonesia, Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 dimiliki oleh Timor Leste dengan angka yaitu 41,8% dan yang terendah dimiliki oleh Vietnam dengan angka yaitu 6,1%. Perbedaan angka yang cukup signifikan terus mendorong ASEAN untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan perekonomian negara sehingga angka kemiskinan di ASEAN dapat menurun setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan daerah yang luas terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat ditahun 2022, Indonesia diantara negara ASEAN memiliki angka kemiskinan sebesar 9,57%.

Tabel 1.1 Grafik Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2022



Sumber: *DataIndonesia.id*, 2023

Indonesia sebagai negara yang masih memiliki penduduk tergolong dalam kemiskinan terus berupaya serius untuk mengurangi angka kemiskinan setiap

tahunnya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah publik yang harus segera diselesaikan dengan beberapa kebijakan publik. Beberapa kebijakan publik menjadi sebuah program kerja dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan secara langsung dan tidak langsung seiring dengan pertumbuhan populasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan salah satunya dapat terlihat dari pembentukan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial bertugas sebagai penyelenggara semua urusan pemerintah dalam bidang sosial, hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial pada Bab I pasal 2. Kementerian Sosial menjalankan tugas dalam menangani masalah sosial di Indonesia dengan beberapa program kerja, salah satu program kerjanya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia mulai menjalankan PKH sejak tahun 2007 dengan dasar dan landasan hukum yaitu UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Permensos No. I Tahun 2018 Program Keluarga Harapan pada Bab 1 pasal 1 menjelaskan Program Keluarga Harapan adalah “Program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)”. Penerapan salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan diharapkan dapat terus berjalan beriringan dengan program-program lainnya sehingga kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun.

Program-program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak dalam menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis oleh

Badan Pusat Statistik Indonesia (2022: 11) menjabarkan jumlah penduduk Indonesia yang miskin terdiri dari masyarakat di perkotaan dan pedesaan pada Maret 2022 berjumlah 26,16 juta jiwa (9,54%), mengalami penurunan disbanding dengan bulan Maret 2021 sebesar 27,54 juta jiwa (10,14%). Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh program pemerintah yaitu PKH. Pada 2021, PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rumah tangga miskin yang memiliki ibu hamil, menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, memiliki anak SD, SMP, SMA, memiliki lansia dan disabilitas. PKH bertujuan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat pencegahan dan bukan pengobatan. Selain itu adanya upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi program wajib belajar selama 12 tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang kurang mampu. Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki regulasi yang jelas dalam penerapannya. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berubah menyesuaikan kondisi negara. Regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan PKH tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 02/3/BS.02.01/01/2020 Tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 2020. Regulasi terbaru memuat beberapa aturan yang mengatur batas bantuan penerima serta komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Regulasi terbaru yang dikeluarkan Kementerian Sosial PKH menjelaskan bantuan maksimal empat orang dalam satu keluarga. Kemudian penerima PKH terdiri dari dua komponen yaitu

komponen pertama meliputi ibu hamil, anak usia dini, lansia, dan disabilitas. Komponen kedua meliputi bantuan pendidikan keluarga PKH bagi anak usia sekolah SD hingga SMA.

Menurut Najidah dkk (2019:2), bantuan Program Keluarga Harapan merupakan perwujudan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat miskin dan sebagai komitmen dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan yang diluncurkan oleh Kementrian Sosial ini fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pendidikan anak-anak menjadi perhatian dari bantuan PKH karena anak-anak merupakan calon penerus bangsa. Penerima PKH diberikan beberapa syarat serta kriteria yaitu terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) diukur berdasarkan prinsip 4T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi. Menurut Hia (2021: 2), prinsip 4T dinilai cukup penting karena sebagai indikator bahwa bantuan Program Keluarga Harapan dapat mencapai tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Prinsip tepat sasaran dalam bantuan Program Keluarga Harapan dapat berjalan baik jika data mengenai masyarakat miskin benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Pembagian bantuan Program Keluarga Harapan juga harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat miskin dapat segera memenuhi kebutuhannya tanpa harus menunggu beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk mendapatkan bantuan. Selain waktu yang harus tepat dalam penerapan PKH, jumlah dari bantuan PKH juga mesti tepat sesuai dengan Undang-Undang tanpa adanya potongan. Kemudian tepat administrasi untuk

memastikan bahwa proses penyaluran bantuan PKH dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Seluruh regulasi terkait bantuan Program Keluarga Harapan berlaku untuk seluruh daerah Indonesia tanpa terkecuali. Kebijakan publik mengenai bantuan Program Keluarga Harapan ini secara tidak langsung juga dapat diawasi praktiknya diseluruh wilayah Indonesia karena kesamaan regulasinya. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah lokasi pelaksanaann Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2010, dimana pada saat itu yang mendapat alokasi yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Landak. Alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan terus meluas dari tahun ke tahun ke berbagai daerah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu daerah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya (2023: 5,64), Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah sebesar 8.492,1 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 622.217 jiwa di periode tahun 2022. Memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, Kabupaten Kubu Raya masih memiliki masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupaya maksimal dalam mengurangi kemiskinan di Sembilan kecamatan. Bantuan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya dirasakan cukup efektif sehingga angka kemiskinan setiap tahunnya menurun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya (2023: 168), tercatat bahwa angka kemiskinan di tahun 2021 memiliki persentase sebesar 4,34% sedangkan ditahun 2022 turun menjadi 4,12%, hal ini membuktikan upaya pemerintah untuk mengatasi

kemiskinan dinilai cukup efektif dengan beberapa program bantuan, salah satunya bantuan Program Keluarga Harapan.

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa Kecamatan dan Desa yang tersebar luas. Salah satu Kecamatan dan Desa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan yaitu Kecamatan Batu Ampar. Kecamatan Batu Ampar merupakan wilayah produktif dalam menghasilkan produk pertanian berupa kelapa yang kemudian diolah menjadi kopra. Selain aktif menghasilkan kopra sebagai komoditi ekspor, masyarakat Kecamatan Batu Ampar juga berprofesi sebagai nelayan dan peternak. Salah satu desa di wilayah Kecamatan Batu Ampar yang tergolong produktif yaitu Desa Padang Tikar 1 dengan jumlah penduduk sebanyak 4.297, data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (2023: 5).

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Desa Padang Tikar 1 Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

Jenis Kelamin		Total
Laki – Laki	Perempuan	
2.119 Orang	2.178 Orang	4.297 Orang

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan Tabel 1.2. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Padang Tikar 1 tercatat sebanyak 4.297 orang. Penduduk tersebut terdiri dari 2.119 orang laki-laki dan 2.178 orang perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan di desa ini sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Desa Padang Tikar 1, meskipun memiliki wilayah yang produktif dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan di beberapa golongan penduduknya. Kelompok masyarakat miskin ini terdiri dari keluarga yang memiliki keterbatasan dalam akses

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mereka cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama pangan, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan.

Tabel 1.3.

Jumlah Masyarakat Miskin Desa Padang Tikar 1
Tahun 2024

Jenis Kelamin		Total
Laki – Laki	Perempuan	
180 Orang	217 Orang	397

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan tabel 1.3. Pada tahun 2024, jumlah masyarakat miskin di Desa Padang Tikar 1 tercatat sebanyak 397 orang, terdiri dari 180 laki-laki dan 217 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan miskin lebih banyak dibandingkan laki-laki. Meskipun program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), telah diberikan untuk membantu masyarakat kurang mampu, tidak semua masyarakat miskin di desa ini mendapatkan bantuan tersebut. Sebagian lainnya menerima bantuan non-PKH yang juga disalurkan oleh pemerintah atau pihak terkait, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program sosial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap.

Pengelolaan dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Tikar 1 telah terealisasi sebanyak 236 kepala rumah tangga. Bantuan Program Keluarga Harapan terealisasikan sesuai dengan komponen masyarakat yang berhak menerimanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tercatat dalam data penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Padang Tikar 1 terdapat 1 golongan yang banyak mendapatkan yaitu anak sekolah dari semua jenjang. Golongan ini banyak mendapatkan manfaat dari bantuan Program

Keluarga Harapan karena jumlah penerimanya terdiri dari tiga jenjang pendidikan seperti SD, SMP dan SMA serta durasi penerimaan bantuan. Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang disalurkan kepada anak sekolah seperti SD, SMP dan SMA berjumlah 193 penerima.

Tabel 1.4.

Bantuan Non Tunai PKH Desa Padang Tikar 1
Tahun 2020 s/d 2024

No	Kategori	Jenis	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pendidikan SD / SMP / SMA	Rasta	170	184	189	190	193
2	Ibu Hamil & Menyusui	Rasta	35	30	36	37	40
3	Lanjut Usia	Rasta	10	7	6	4	4
Grand Total			215	221	231	231	237

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan Tabel 1.4. Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Beras Sejahtera (Rasta) di Desa Padang Tikar 1 mengalami peningkatan jumlah penerima dari tahun 2020 hingga 2024. Penerima dari kategori tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA meningkat secara konsisten, dari 170 orang pada tahun 2020 menjadi 193 orang pada tahun 2024. Kategori ibu hamil dan menyusui juga menunjukkan peningkatan, dari 35 orang pada tahun 2020 menjadi 40 orang pada tahun 2024. Sementara itu, kategori lanjut usia mengalami penurunan, dari 10 orang pada tahun 2020 menjadi 4 orang pada tahun 2024. Total penerima meningkat dari 215 menjadi 237 dalam lima tahun terakhir.

Adapun masyarakat miskin Desa Padang Tikar 1 yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan tetapi mendapatkan bantuan Non Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut :

Tabel 1.5.

Jumlah Bantuan Non PKH Desa Padang Tikar 1
Tahun 2024

No	Kategori	Keterangan	Total
1	Bantuan Non PKH	Tersalurkan	10
2	Bantuan Non PKH	Belum Tersalurkan	112
Grand Total			122

Sumber : Kantor Desa Padang Tikar 1 2024

Berdasarkan Tabel 1.4. Pada tahun 2024, Desa Padang Tikar 1 mencatat penyaluran bantuan non-PKH dengan total sebanyak 122 bantuan yang dialokasikan untuk masyarakat miskin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 bantuan telah berhasil tersalurkan kepada penerima, sementara 112 bantuan lainnya masih dalam proses dan belum tersalurkan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyaluran bantuan non-PKH secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan, langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk memastikan bantuan tersebut dapat diterima oleh semua penerima yang memenuhi syarat, guna membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Hasan (2017:3), menjelaskan bagaimana bantuan Program Keluarga Harapan secara tidak langsung mendukung program Kementerian Pendidikan untuk membuat anak-anak di semua jenjang pendidikan yang masih berada dalam kemiskinan dapat terus melanjutkan pendidikannya selama 12 tahun. Selain itu dengan adanya bantuan ini membuat anak-anak tidak perlu bekerja sehingga mengakibatkan putus sekolah. Pentingnya pendidikan dapat menjadi pendukung Indonesia terlepas dari kemiskinan serta membentuk pola pikir, norma dan sikap yang baik kedepannya. Melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Pendidikan juga dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, sanitasi, dan perencanaan keluarga, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dari jumlah bantuan Program Keluarga Harapan, mengindikasikan bahwa anak sekolah menjadi salah satu komponen bagi mendapatkan bantuan PKH seperti ibu hamil, anak usia dini, lansia Indonesia untuk terlepas dari kemiskinan tanpa mengesampingkan golongan lain yang dan disabilitas.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. PKH memiliki tiga komponen utama, yaitu Komponen Kesehatan, Komponen Pendidikan, dan Komponen Kesejahteraan Sosial. Komponen Kesehatan memberikan bantuan untuk ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun sebesar Rp 3.000.000 per tahun. Komponen Pendidikan memberikan bantuan untuk anak usia SD, SMP, dan SMA, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000 per tahun. Komponen Kesejahteraan Sosial memberikan bantuan untuk disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas sebesar Rp 2.400.000 per tahun (<https://kemensos.go.id/>) .

Selain PKH, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang merupakan bantuan sosial nontunai yang diberikan kepada KPM. Jenis bantuan sosial lainnya yang sering disalurkan bersama PKH dan BPNT antara lain Bantuan Beras 10 Kg, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan BLT mitigasi pangan. Kedua program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka (<https://kemensos.go.id/>) .

Menurut Restianti (2017: 2), menjelaskan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan kepada anak sekolah seharusnya dapat menjadi pendongkrak bagi siswa untuk dapat unggul dan berprestasi, namun masih ada beberapa orang tua yang masih belum mampu mengelola dana bantuan secara bijak. Selain pengelolaan dana yang kurang bijak, implementasi bantuan Program Keluarga Harapan juga memiliki beberapa kendala dari pihak pengelola bantuan seperti sosialisasi terkait PKH yang kurang masif serta penyaluran dana kepada penerima bantuan cukup lambat. Kendala yang ditemukan dalam proses implementasi perlu diperhatikan serta diselesaikan dengan solusi yang tepat dan cepat sehingga dapat meminimalisir efek kerugian. Beberapa kendala terkait implementasi Program Keluarga Harapan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kriteria 4T dari sebuah bantuan. Hal ini dapat menjadi masalah serius karena bantuan yang telah dijalankan menggunakan finansial yang berasal dari negara. Dana yang seharusnya menjadi investasi bagi Indonesia kedepannya untuk mengurangi kemiskinan serta melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi gagal akibat pengelolaan serta implementasi yang buruk dari sebuah kebijakan publik. Efek kerugian dalam proses implementasi tidak baik bagi pengelola serta penerima bantuan PKH, efek ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia kedepannya.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan dalam beberapa paragraf sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. meninjau implementasi bantuan PKH bagi anak sekolah di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan menyesuaikan terhadap regulasi yang telah diterapkan pemerintah Indonesia.
2. Masalah penelitian ini sesuai dengan teori *Van Meter dan Van Horn* mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik salah satunya terkait agen pelaksana dari unit terbesar sampai terkecil dalam suatu organisasi pemerintah.
3. Peninjauan terkait implementasi bantuan PKH kepada anak sekolah juga mesti dilihat dari sisi masyarakat apakah sudah tepat guna dan berdampak terhadap anak yang mendapatkan bantuan.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah mengenai efektivitas dan efisiensi dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat belum maksimal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian yaitu: Bagaimana efektivitas dan efisiensi dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi

kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan dari peneliti yaitu mengetahui efektivitas dan efesiensi dari implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yakni diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pada kajian kebijakan publik mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yakni diharapkan sebagai bahan masukan dan wawasan bagi mahasiswa, masyarakat yang terkait tentang proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Tikar 1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan .